

**PENERAPAN PRINSIP KEADILAN DALAM PENETAPAN
TARIF RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
DI KABUPATEN BANYUMAS**

Disusun Oleh:

RAFIF ZUFAR ATHALLAH ADHYAKSA ROZMA

E1A021119

ABSTRAK

Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas sebagai salah satu bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kewenangan dalam pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, serta untuk mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Struktur dan besaran tarif retribusi tersebut diklasifikasikan berdasarkan zona, jenis kendaraan dan satuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan prinsip keadilan dalam penetapan tarif retribusi parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Banyumas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan *statute approach* dan *conseptual approach*. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa penerapan prinsip keadilan dalam penetapan tarif retribusi parkir di tepi jalan umum diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah sebagai sarana menciptakan kepastian hukum, sinergitas dan keserasian hubungan antara pengguna jalan dan pengguna layanan fasilitas parkir, serta kontribusi dalam pembangunan daerah sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan umum. Sementara itu, penerapan prinsip keadilan dalam penetapan tarif retribusi parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Banyumas dalam Perda PDRD sebagai pendelegasian kewenangan dari UU LLAJ dan UU HKPD belum sepenuhnya diimplementasikan sehingga perlu adanya peninjauan kembali.

Kata Kunci: *Prinsip Keadilan, Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, Kabupaten Banyumas*

**IMPLEMENTATION OF FAIRNESS PRINCIPLE IN DETERMINING
PARKING RETRIBUTION RATES ON PUBLIC ROADSIDES
IN BANYUMAS REGENCY**

Written by:

RAFIF ZUFAR ATHALLAH ADHYAKSA ROZMA

E1A021119

ABSTRACT

The Local Government of Banyumas Regency as one part of the Unitary State of the Republic of Indonesia has the authority to levy parking fees on the edge of public roads as one of the important sources of local revenue to finance the administration of local government and development, as well as to support the improvement of services to the community. The structure and amount of the retribution tariff are classified based on zone, vehicle type and unit. This study aims to determine and analyze the application of the principle of fairness in determining parking retribution rates on the edge of public roads in Banyumas Regency. The research method used in this study is normative legal research with statute approach and conceptual approach. The results of the research and discussion show that the application of the principle of fairness in the determination of parking retribution rates on the edge of public roads is realized in the form of local regulations as a means of creating legal certainty, synergy and harmony in the relationship between road users and parking facility service users, and contribution to regional development as an effort to realize public welfare. Meanwhile, the application of the principle of fairness in the determination of parking retribution rates on the edge of public roads in Banyumas Regency in the Local Tax and Retribution Regulations as a delegation of authority from the Law on Road Traffic and Transportation and the Law on Financial Relations between the Central Government and Local Governments has not been fully implemented so that it needs to be reviewed.

Keywords: *Principle of Justice, Retribution on Public Roadside Parking, Banyumas Regency*